

## **Determinan Pelaporan Kinerja BLUD pada Puskesmas Banggae I Majene: Analisis Peran Teknologi Informasi, Kompetensi SDM, dan Pengawasan Fungsional**

La Ode Hidayat<sup>1✉</sup>, Rizky A<sup>2</sup>, Rian Puspitasari<sup>3</sup>, Sofyan Hamid Indar<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Administrasi Kesehatan, Universitas Sulawesi Barat

<sup>4</sup> Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia

### **Abstrak**

Pelaporan kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan instrumen strategis dalam memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola berbasis kinerja pada layanan kesehatan primer. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan fungsional terhadap pelaporan kinerja BLUD di Puskesmas Banggae I Kabupaten Majene. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif-kausal. Sampel berjumlah 52 responden, dan data dikumpulkan melalui kuesioner, kemudian dianalisis menggunakan uji *chi-square* dan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pelaporan kinerja BLUD ( $F = 17,746$ ;  $p = 0,000$ ), dengan nilai R Square sebesar 0,526, yang berarti model menjelaskan 52,6% variasi pelaporan kinerja. Secara parsial, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan dengan arah negatif ( $B = -1,610$ ;  $t = -3,515$ ;  $p = 0,001$ ), kompetensi SDM berpengaruh signifikan dengan arah negatif ( $B = -1,047$ ;  $t = -2,571$ ;  $p = 0,013$ ), sedangkan pengawasan fungsional berpengaruh positif dan signifikan ( $B = 0,529$ ;  $t = 2,557$ ;  $p = 0,014$ ). Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas pelaporan kinerja BLUD tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi dan kapasitas pegawai, tetapi juga oleh kesiapan sistem, kesesuaian kompetensi teknis, dan efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, peningkatan pelaporan kinerja BLUD memerlukan integrasi sistem informasi, penguatan kompetensi teknis, dan pengawasan fungsional berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *BLUD; pelaporan kinerja; teknologi informasi; kompetensi SDM; pengawasan*

### **Abstract**

Performance reporting of Regional Public Service Agencies (BLUD) is a strategic instrument for strengthening accountability, transparency, and performance-based governance in primary healthcare services. This study aims to analyze the effects of information technology utilization, human resource competence, and functional supervision on BLUD performance reporting at Puskesmas Banggae I, Majene Regency. This study employed a quantitative approach with a causal-associative design. A total of 52 respondents participated in the study, and data were collected using a questionnaire and analyzed through chi-square tests and multiple linear regression. The results show that the three variables simultaneously have a significant effect on BLUD performance reporting ( $F = 17.746$ ;  $p = 0.000$ ), with an R Square value of 0.526, indicating that the model explains 52.6% of the variation in performance reporting. Partially, information technology utilization had a significant negative effect ( $B = -1.610$ ;  $t = -3.515$ ;  $p = 0.001$ ), human resource competence had a significant negative effect ( $B =$

-1.047;  $t = -2.571$ ;  $p = 0.013$ ), while functional supervision had a positive and significant effect ( $B = 0.529$ ;  $t = 2.557$ ;  $p = 0.014$ ). These findings indicate that BLUD performance reporting quality is not determined solely by technology availability and employee capacity, but also by system readiness, technical competency alignment, and effective supervision. Therefore, improving BLUD performance reporting requires integrated information systems, technical capacity strengthening, and continuous functional supervision.

**Keywords:** *BLUD; performance reporting; information technology; human resources; supervision*

Copyright (c) 2025 La Ode Hidayat

---

✉ Corresponding author : La Ode Hidayat  
Email Address : laode.hidayat@unsulbar.ac.id

## PENDAHULUAN

Reformasi sektor publik melalui pendekatan *New Public Management* (NPM) menekankan pentingnya efisiensi, akuntabilitas, desentralisasi manajerial, dan orientasi hasil dalam pengelolaan organisasi publik. NPM mendorong perubahan dari model birokrasi tradisional yang berorientasi pada prosedur menuju tata kelola yang lebih menekankan kinerja, pengukuran hasil, serta pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya publik (Hood, 1991). Dalam perkembangan administrasi publik modern, reformasi manajemen publik juga tidak hanya berhenti pada efisiensi, tetapi bergerak menuju penguatan tata kelola, transparansi, dan kemampuan organisasi publik dalam menghasilkan informasi kinerja yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan (Pollitt and Bouckaert, 2017).

Dalam konteks tersebut, pelaporan kinerja menjadi instrumen penting karena organisasi publik tidak hanya dituntut melaksanakan program, tetapi juga harus mampu menunjukkan capaian, efektivitas, dan akuntabilitas atas sumber daya yang dikelolanya. Behn (2003) menegaskan bahwa pengukuran kinerja dalam sektor publik tidak semata-mata bertujuan untuk mengumpulkan data, tetapi juga digunakan untuk evaluasi, pengendalian, penganggaran, pembelajaran, perbaikan layanan, dan pertanggungjawaban kepada publik. Dengan demikian, pelaporan kinerja memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara pelaksanaan kegiatan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kelembagaan.

Sejalan dengan itu, konsep akuntabilitas publik menempatkan organisasi pemerintah sebagai aktor yang wajib menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, serta penggunaan sumber daya kepada forum atau pihak yang memiliki kewenangan untuk menilai kinerja tersebut (Bovens, 2007). Dalam organisasi pelayanan publik seperti Puskesmas, akuntabilitas tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan administratif, tetapi juga sebagai kemampuan lembaga untuk menyajikan informasi yang transparan, tepat waktu, akurat, dan dapat digunakan dalam menilai pencapaian layanan. Oleh karena itu, kualitas pelaporan kinerja menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai keberhasilan tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Perkembangan reformasi sektor publik juga semakin dipengaruhi oleh transformasi digital. Dunleavy et al. (2006) menyatakan bahwa tata kelola sektor publik kontemporer bergerak menuju digital-era governance, yaitu tata kelola yang menekankan reintegrasi layanan, penyederhanaan proses, dan digitalisasi administrasi pemerintahan. Dalam perspektif ini, teknologi informasi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu teknis, tetapi juga sebagai infrastruktur kelembagaan yang dapat memperkuat integrasi data, mempercepat arus informasi, dan meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan laporan yang lebih akurat dan responsif.

Dalam konteks pelaporan keuangan dan kinerja sektor publik, pemanfaatan teknologi informasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas informasi. Model

keberhasilan sistem informasi yang dikembangkan oleh DeLone and McLean (2003) menjelaskan bahwa kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan merupakan komponen penting yang menentukan manfaat bersih suatu sistem informasi bagi organisasi. Pada sektor publik, teknologi informasi juga dapat memperkuat transparansi keuangan karena memungkinkan penyediaan informasi fiskal secara lebih terbuka, berkala, dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan (Rodríguez Bolívar, Caba Pérez and López Hernández, 2007). Dengan demikian, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan BLUD menjadi faktor penting untuk menjamin ketepatan waktu, konsistensi, dan keterpaduan data pelaporan.

Selain teknologi, kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor yang tidak dapat dipisahkan dari kualitas pelaporan kinerja. Sistem informasi yang baik tidak akan menghasilkan laporan yang berkualitas apabila tidak didukung oleh pegawai yang memahami regulasi, prosedur akuntansi, pengelolaan keuangan, dan mekanisme pelaporan. Rakhman and Wijayana (2019), dalam kajian tentang kualitas pelaporan keuangan sektor publik di Indonesia, menunjukkan bahwa kualitas pelaporan sektor publik masih menjadi isu penting dan dipengaruhi oleh karakteristik kelembagaan serta kapasitas pengelolaan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan aparatur dalam memahami dan mengelola proses pelaporan merupakan prasyarat penting dalam menghasilkan informasi yang andal.

Di sisi lain, pengawasan fungsional memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa pelaporan kinerja disusun sesuai dengan prinsip kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas. Pengawasan dalam sektor publik tidak hanya bertujuan menemukan kesalahan, tetapi juga mendorong perbaikan proses, memperkuat kepatuhan terhadap regulasi, dan memastikan bahwa informasi yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Cordery and Hay (2019) menegaskan bahwa lembaga audit dan pengawasan sektor publik memiliki peran penting dalam menjaga akuntabilitas, menilai kepatuhan, serta mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya publik. Oleh karena itu, pengawasan fungsional menjadi mekanisme kontrol yang penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan kinerja BLUD.

Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama memiliki peran strategis dalam implementasi BLUD karena berhadapan langsung dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam perspektif pembiayaan kesehatan, kualitas pengelolaan keuangan publik sangat menentukan kemampuan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan yang efektif, efisien, adil, dan akuntabel. Piatti-Fünfkirchen and Schneider (2018) menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan publik dalam sektor kesehatan dapat menjadi penghambat atau justru menjadi pendorong peningkatan layanan, tergantung pada fleksibilitas anggaran, keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, serta kualitas evaluasi kinerja. Dengan demikian, pelaporan kinerja BLUD Puskesmas tidak dapat dilepaskan dari kualitas pengelolaan keuangan, kapasitas organisasi, serta mekanisme pertanggungjawaban yang diterapkan.

Dalam konteks Indonesia, penerapan BLUD merupakan wujud adaptasi prinsip reformasi sektor publik yang memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan kepada unit pelayanan agar mampu meningkatkan mutu layanan. Namun, fleksibilitas tersebut harus diimbangi dengan sistem pelaporan yang kuat agar otonomi pengelolaan tidak menimbulkan masalah akuntabilitas. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, pengawasan fungsional, dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan BLUD (Sandria, Agusti and Putra, 2020; Aini and Yasni, 2022). Penelitian Ricardo, Trisna and Astika (2023) juga menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan BLUD Puskesmas berkaitan dengan faktor internal organisasi, termasuk sumber daya manusia dan sistem yang digunakan dalam penyusunan laporan.

Permasalahan pelaporan BLUD juga terlihat pada Puskesmas di Kabupaten Majene. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan, terdapat ketidaksesuaian antara saldo buku besar dan neraca konsolidasi pada pengelolaan kas BLUD Puskesmas di Kabupaten Majene. Selain itu, terdapat kendala berupa belum optimalnya penyusunan laporan keuangan BLUD secara mandiri, keterlambatan laporan auditor independen, serta persoalan teknis dalam pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaporan kinerja BLUD masih menghadapi tantangan pada aspek integrasi data, kompetensi pengelola, serta pengawasan fungsional.

Meskipun penelitian mengenai BLUD telah banyak dilakukan, sebagian besar studi sebelumnya masih berfokus pada efektivitas pengelolaan keuangan atau kualitas laporan keuangan, bukan pada pelaporan kinerja sebagai proses akuntabilitas organisasi. Padahal, literatur internasional menegaskan bahwa informasi kinerja yang dikumpulkan organisasi publik tidak selalu digunakan secara optimal apabila tidak didukung oleh sistem manajemen kinerja, kapasitas organisasi, dan mekanisme pengawasan yang memadai (Hammerschmid, Van de Walle and Štimac, 2013). Oleh karena itu, kajian mengenai pelaporan kinerja BLUD pada tingkat Puskesmas menjadi penting untuk mengisi celah penelitian, terutama dalam konteks fasilitas pelayanan kesehatan primer di daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menitikberatkan pada pelaporan kinerja BLUD sebagai instrumen akuntabilitas di tingkat Puskesmas, bukan semata-mata pada efektivitas pengelolaan keuangan. Penelitian ini secara spesifik menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan fungsional terhadap pelaporan kinerja BLUD di Puskesmas Banggae I Kabupaten Majene. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi penguatan tata kelola BLUD Puskesmas Banggae I Kabupaten Majene, khususnya dalam meningkatkan akurasi, ketepatan waktu, transparansi, dan akuntabilitas pelaporan kinerja.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan rancangan survei observasional potong lintang (*cross-sectional survey*) dan pendekatan asosiatif-kausal. Rancangan ini digunakan untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan fungsional terhadap pelaporan kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pendekatan potong lintang dipilih karena pengumpulan data dilakukan pada satu periode waktu tertentu sehingga sesuai untuk mengukur hubungan antarvariabel berdasarkan persepsi responden pada saat penelitian berlangsung. Penyusunan metode penelitian mengacu pada prinsip pelaporan studi observasional yang menekankan kejelasan desain, setting, partisipan, variabel, sumber data, ukuran sampel, potensi bias, dan teknik analisis statistik (von Elm et al., 2007; Vandembroucke et al., 2007).

Penelitian dilaksanakan di Puskesmas Banggae I Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, pada bulan Juni sampai Juli 2025. Lokasi ini dipilih karena Puskesmas Banggae I telah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, sehingga relevan dengan tujuan penelitian. Populasi penelitian adalah seluruh pegawai Puskesmas Banggae I sebanyak 107 orang. Sampel penelitian berjumlah 52 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *random sampling* terhadap pegawai yang memenuhi kriteria penelitian.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pelaporan kinerja BLUD, sedangkan variabel independen terdiri atas pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan fungsional. Data primer dikumpulkan menggunakan kuesioner terstruktur dengan skala Likert. Penggunaan skala Likert dinilai sesuai untuk mengukur

sikap, persepsi, dan penilaian responden terhadap konstruk sosial-organisasional (Likert, 1932).

Analisis data dilakukan menggunakan SPSS for Windows dalam tiga tahap. Pertama, analisis univariat digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden dan distribusi setiap variabel penelitian dalam bentuk frekuensi dan persentase. Kedua, analisis bivariat dilakukan menggunakan uji *chi-square* untuk melihat hubungan antara masing-masing variabel independen dan pelaporan kinerja BLUD. Ketiga, analisis multivariat dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan metode *enter* untuk menguji pengaruh simultan dan parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Regresi linear berganda digunakan karena sesuai untuk menilai kontribusi beberapa variabel prediktor terhadap satu variabel dependen dalam penelitian sosial dan organisasi (Cohen et al., 2003).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan 52 responden yang merupakan pegawai Puskesmas Banggae I Kabupaten Majene. Karakteristik responden mencakup umur, jenis kelamin, dan pendidikan terakhir. Data karakteristik responden dalam skripsi menunjukkan bahwa responden terbanyak berada pada kelompok umur 20-30 tahun sebanyak 21 orang atau 40,4%, mayoritas berjenis kelamin perempuan sebanyak 46 orang atau 88,5%, serta sebagian besar memiliki pendidikan terakhir S1 sebanyak 38 orang atau 73,1%. Data tersebut menjadi dasar untuk memahami profil sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaporan kinerja BLUD di Puskesmas Banggae I.

Tabel 1. Karakteristik Responden di Puskesmas Banggae I

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
Umur	20-30 tahun	21	40,4
	31-40 tahun	18	34,6
	41-55 tahun	13	25,0
	<b>Total</b>	52	100,0
Jenis kelamin	Laki-laki	6	11,5
	Perempuan	46	88,5
	<b>Total</b>	52	100,0
Pendidikan	D3	8	15,4
	D4	5	9,6
	S1	38	73,1
	S2	1	1,9
	<b>Total</b>	52	100,0

Sumber: Data Primer, 2025.

Berdasarkan Karakteristik responden menunjukkan bahwa mayoritas pegawai berada pada kelompok usia produktif dan memiliki tingkat pendidikan sarjana. Kondisi ini secara teoritis dapat menjadi modal organisasi dalam mendukung proses pelaporan kinerja BLUD, karena pelaporan kinerja membutuhkan kemampuan memahami regulasi, menggunakan sistem informasi, membaca dokumen keuangan, serta menyusun laporan sesuai standar akuntabilitas publik. Dalam perspektif *knowledge-based view*, organisasi memperoleh kapasitasnya bukan hanya dari jumlah pegawai, tetapi dari kemampuan organisasi mengintegrasikan pengetahuan individual ke dalam proses kerja yang terkoordinasi (Grant, 1996). Dengan demikian, dominasi responden berpendidikan S1 dapat menjadi potensi penting, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada kesesuaian kompetensi dengan tugas pelaporan BLUD.

Namun, karakteristik individu saja tidak cukup menjamin kualitas pelaporan kinerja. Riset Moynihan and Pandey (2010) pada manajer sektor publik menunjukkan bahwa penggunaan informasi kinerja lebih dipengaruhi oleh faktor organisasi, seperti ketersediaan informasi, budaya organisasi, peran kepemimpinan, dan fleksibilitas administratif, bukan semata-mata oleh karakteristik individu. Temuan ini relevan dengan konteks Puskesmas Banggae I, karena meskipun sebagian besar responden memiliki pendidikan tinggi, pelaporan kinerja BLUD tetap membutuhkan dukungan teknologi, pembagian tugas yang jelas, serta pengawasan fungsional yang konsisten.

### Distribusi Variabel Penelitian

Distribusi variabel penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi sebagian besar berada pada kategori rendah sebanyak 30 responden atau 57,7%. Kompetensi SDM juga sebagian besar berada pada kategori rendah sebanyak 29 responden atau 55,8%. Sebaliknya, pengawasan fungsional mayoritas berada pada kategori tinggi sebanyak 34 responden atau 65,4%, dan pelaporan kinerja BLUD mayoritas berada pada kategori tinggi sebanyak 31 responden atau 59,6%.

Tabel 2. Distribusi Variabel Penelitian

Variabel	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rendah	30	57,7
	Tinggi	22	42,3
	<b>Total</b>	52	100,0
Kompetensi SDM	Rendah	29	55,8
	Tinggi	23	44,2
	<b>Total</b>	52	100,0
Pengawasan Fungsional	Rendah	18	34,6
	Tinggi	34	65,4
	<b>Total</b>	52	100,0
Pelaporan Kinerja BLUD Puskesmas Banggae I	Rendah	21	40,4
	Tinggi	31	59,6
	<b>Total</b>	52	100,0

Sumber: Data Primer, 2025.

Hasil univariat menunjukkan adanya pola yang menarik. Di satu sisi, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi SDM masih dominan pada kategori rendah. Di sisi lain, pengawasan fungsional dan pelaporan kinerja BLUD justru dominan pada kategori tinggi. Pola ini mengindikasikan bahwa pelaporan kinerja BLUD di Puskesmas Banggae I kemungkinan masih banyak ditopang oleh mekanisme pengawasan, rutinitas administratif, dan kepatuhan prosedural, bukan sepenuhnya oleh kematangan teknologi dan kompetensi teknis pegawai.

Secara teoritis, teknologi informasi seharusnya memperkuat pelaporan kinerja karena dapat meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan integrasi data. Model keberhasilan sistem informasi DeLone and McLean (2003) menekankan bahwa manfaat sistem informasi sangat ditentukan oleh kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan sistem, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih yang dihasilkan. Artinya, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi hambatan bagi kualitas pelaporan jika sistem belum mudah digunakan, data belum terintegrasi, atau dukungan teknis belum memadai.

Temuan kompetensi SDM yang masih dominan rendah juga penting untuk diperhatikan. Dalam teori *human capital resource*, kompetensi pegawai baru akan menjadi sumber daya organisasi yang bernilai jika pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman

individu mampu dikonversi menjadi kapasitas kolektif organisasi (Ployhart and Moliterno, 2011). Oleh karena itu, pelatihan teknis BLUD, pemahaman regulasi, kemampuan menggunakan aplikasi pelaporan, serta kesesuaian penempatan pegawai menjadi faktor penting untuk memastikan kompetensi SDM benar-benar mendukung pelaporan kinerja.

Sementara itu, tingginya pengawasan fungsional dapat menjelaskan mengapa pelaporan kinerja BLUD tetap berada pada kategori tinggi meskipun pemanfaatan teknologi dan kompetensi SDM masih rendah. Dalam kerangka akuntabilitas publik, pengawasan berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan organisasi publik dapat menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan memperbaiki pelaksanaan tugasnya (Bovens, 2007). Hal ini juga sejalan dengan Cordery and Hay (2019), yang menegaskan bahwa audit dan pengawasan sektor publik berperan penting dalam menjaga akuntabilitas, menilai kepatuhan, serta mendorong efektivitas penggunaan sumber daya publik.

### Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi SDM, dan Pengawasan Fungsional dengan Pelaporan Kinerja BLUD

Analisis bivariat dilakukan untuk melihat hubungan masing-masing variabel independen dengan pelaporan kinerja BLUD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki hubungan signifikan dengan pelaporan kinerja BLUD dengan nilai p-value 0,000. Kompetensi SDM juga memiliki hubungan signifikan dengan pelaporan kinerja BLUD dengan p-value 0,000. Pengawasan fungsional memiliki hubungan signifikan dengan pelaporan kinerja BLUD dengan p-value 0,039.

Tabel 3. Hubungan Variabel Independen dengan Pelaporan Kinerja BLUD

Variabel	Kategori	Pelaporan Kinerja BLUD				Total (n)	Total (%)	P-Value
		Rendah (n)	Rendah (%)	Tinggi (n)	Tinggi (%)			
Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rendah	2	12,1	28	17,9	30	30,0	<b>0,000</b>
	Tinggi	19	8,9	3	13,1	22	22,0	
	<b>Total</b>	21	21,0	31	31,0	52	52,0	
Kompetensi SDM	Rendah	1	11,7	28	17,3	29	29,0	<b>0,000</b>
	Tinggi	20	9,3	3	13,7	23	23,0	
	<b>Total</b>	21	21,0	31	31,0	52	52,0	
Pengawasan Fungsional	Rendah	11	7,3	7	10,7	18	18,0	<b>0,039</b>
	Tinggi	10	13,7	24	20,3	34	34,0	
	<b>Total</b>	21	21,0	31	31,0	52	52,0	

Sumber: Data Primer, 2025.

Hasil bivariat menunjukkan bahwa ketiga variabel independen memiliki hubungan signifikan dengan pelaporan kinerja BLUD Puskesmas Banggae I. Hubungan pemanfaatan teknologi informasi dengan pelaporan kinerja BLUD menunjukkan bahwa aspek digitalisasi tidak dapat dipisahkan dari proses pelaporan organisasi publik. Temuan ini sejalan dengan Rodríguez Bolívar, Caba Pérez and López Hernández (2007), yang menjelaskan bahwa *e-government* dapat mendorong penyediaan informasi keuangan publik secara lebih teratur, tepat waktu, dan terbuka bagi pemangku kepentingan. Dalam konteks BLUD Puskesmas, teknologi informasi berperan penting dalam pencatatan, rekonsiliasi, penggabungan data, dan penyusunan laporan kinerja.

Namun, pola data menunjukkan bahwa responden dengan pemanfaatan teknologi informasi rendah justru lebih banyak berada pada kategori pelaporan kinerja tinggi. Pola ini perlu dibaca secara hati-hati. Dalam kajian sistem informasi, manfaat teknologi tidak bersifat otomatis. Brynjolfsson and Hitt (2000) menunjukkan bahwa nilai teknologi informasi sangat

dipengaruhi oleh investasi organisasi pelengkap, seperti perubahan proses kerja, penataan organisasi, dan kemampuan manusia. Dengan demikian, rendahnya atau tingginya penggunaan teknologi tidak selalu langsung mencerminkan kualitas pelaporan jika sistem yang digunakan masih kompleks, pelatihan belum memadai, atau proses pelaporan masih sangat bergantung pada prosedur manual.

Hubungan kompetensi SDM dengan pelaporan kinerja BLUD juga signifikan. Hasil ini menegaskan bahwa pelaporan kinerja tidak hanya merupakan proses administratif, tetapi juga proses teknis yang membutuhkan pemahaman terhadap regulasi BLUD, pencatatan keuangan, pelaporan pertanggungjawaban, dan penggunaan aplikasi. Akan tetapi, seperti pada variabel teknologi, pola bivariat menunjukkan bahwa kategori kompetensi SDM rendah lebih banyak terkait dengan pelaporan kinerja tinggi. Hal ini dapat terjadi apabila pelaporan masih dikerjakan berdasarkan rutinitas, arahan pimpinan, atau pengawasan, bukan semata-mata berdasarkan kompetensi individual. Riset Hammerschmid, Van de Walle and Štimac (2013) menunjukkan bahwa penggunaan informasi kinerja dalam organisasi publik sangat dipengaruhi oleh instrumen manajemen kinerja dan faktor organisasi, bukan hanya karakteristik individu.

Hubungan pengawasan fungsional dengan pelaporan kinerja BLUD menunjukkan pola yang lebih konsisten. Responden dengan pengawasan fungsional tinggi lebih banyak berada pada kategori pelaporan kinerja tinggi. Hal ini memperkuat teori akuntabilitas publik yang menempatkan pengawasan sebagai instrumen untuk memastikan aktor publik menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakannya kepada pihak yang berwenang. Bovens (2007) menempatkan akuntabilitas sebagai hubungan antara aktor dan forum, di mana aktor berkewajiban menjelaskan tindakan, forum dapat menilai, dan konsekuensi dapat diberikan. Dalam konteks Puskesmas BLUD, pengawasan fungsional membantu menjaga pelaporan tetap sesuai prosedur, mengurangi kesalahan pencatatan, dan memperkuat kepatuhan terhadap regulasi.

### **Pengaruh Simultan Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi SDM, dan Pengawasan Fungsional terhadap Pelaporan Kinerja BLUD Puskesmas Banggae I**

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi SDM, dan pengawasan fungsional secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pelaporan kinerja BLUD. Nilai F sebesar 17,746 dengan p-value 0,000 menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan layak untuk menjelaskan variasi pelaporan kinerja BLUD.

Tabel 4. Hasil Uji Simultan

<b>Komponen</b>	<b>Nilai</b>
Total Jumlah Kuadrat / Total Sum of Squares	4268,673
Jumlah Kuadrat Regresi / Regression	2244,788
Jumlah Kuadrat Residual / Residual	2023,886
Derajat Bebas Regresi / Df Regression	3
Derajat Bebas Residual / Df Residual	48
Rata-rata Kuadrat Regresi / Mean Square	748,263
Rata-rata Kuadrat Residual / Mean Square	42,164
Nilai F	17,746
Sig. / P-Value	0,000

Sumber: Data Primer, 2025.

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa pelaporan kinerja BLUD dipengaruhi secara bersama-sama oleh aspek teknologi, manusia, dan pengawasan. Temuan ini mendukung pendekatan *New Public Management* yang menekankan pentingnya efisiensi, pengukuran kinerja, dan akuntabilitas dalam organisasi publik. Hood (1991) menjelaskan bahwa reformasi

manajemen publik menempatkan kinerja, pengendalian hasil, dan tanggung jawab manajerial sebagai elemen penting dalam tata kelola sektor publik. Dalam konteks BLUD, pelaporan kinerja menjadi instrumen utama untuk menunjukkan bagaimana fleksibilitas pengelolaan keuangan digunakan secara bertanggung jawab.

Temuan simultan ini juga sejalan dengan Behn (2003), yang menegaskan bahwa pengukuran kinerja dalam sektor publik memiliki banyak fungsi, termasuk evaluasi, pengendalian, penganggaran, pembelajaran, perbaikan layanan, dan akuntabilitas. Dengan kata lain, pelaporan kinerja BLUD bukan hanya dokumen administratif, tetapi bagian dari sistem manajemen kinerja yang dapat digunakan untuk menilai penggunaan sumber daya, mengidentifikasi masalah, dan memperbaiki pelayanan kesehatan primer.

Dalam konteks sektor kesehatan, Piatti-Fünfkirchen and Schneider (2018) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan publik berimplikasi langsung terhadap pencapaian tujuan kesehatan seperti efisiensi, kualitas, pemerataan, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, model simultan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa peningkatan pelaporan kinerja BLUD Puskesmas perlu dilakukan secara terintegrasi, bukan hanya dengan memperbaiki satu faktor secara terpisah.

### **Pengaruh Parsial Variabel Independen terhadap Pelaporan Kinerja BLUD Puskesmas Banggae I**

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi SDM, dan pengawasan fungsional berpengaruh signifikan terhadap pelaporan kinerja BLUD. Pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai koefisien B sebesar -1,610 dengan p-value 0,001. Kompetensi SDM memiliki koefisien B sebesar -1,047 dengan p-value 0,013. Pengawasan fungsional memiliki koefisien B sebesar 0,529 dengan p-value 0,014. Berdasarkan hasil tersebut, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi SDM berpengaruh negatif signifikan, sedangkan pengawasan fungsional berpengaruh positif signifikan terhadap pelaporan kinerja BLUD.

Tabel 5. Hasil Uji Parsial

Variabel	Koefisien B	Standar Error	t hitung	Sig. / P-Value
Konstanta	105,761	10,875	9,725	0,000
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1)	-1,610	0,458	-3,515	0,001
Kompetensi SDM (X2)	-1,047	0,407	-2,571	0,013
Pengawasan Fungsional (X3)	0,529	0,207	2,557	0,014

Sumber: Data Primer, 2025.

Secara parsial, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap pelaporan kinerja BLUD, tetapi arah koefisiennya negatif. Secara substantif, temuan ini tidak perlu dimaknai bahwa teknologi informasi selalu menurunkan kualitas pelaporan, melainkan menunjukkan bahwa pada konteks penelitian ini, peningkatan skor pemanfaatan teknologi informasi berkorelasi dengan penurunan skor pelaporan kinerja setelah dikontrol oleh variabel kompetensi SDM dan pengawasan fungsional. Hal ini dapat terjadi ketika pemanfaatan teknologi belum diikuti oleh kesiapan sistem, integrasi data, pelatihan pengguna, dan penyederhanaan proses kerja. Venkatesh et al. (2003) melalui model UTAUT menjelaskan bahwa penerimaan dan penggunaan teknologi dipengaruhi oleh ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, serta kondisi pendukung. Jika kondisi pendukung belum memadai, teknologi dapat menjadi beban administratif, bukan alat peningkatan kinerja.

Temuan ini juga dapat dijelaskan melalui konsep *digital-era governance*. Dunleavy et al. (2006) menyatakan bahwa keberhasilan tata kelola digital tidak hanya bergantung pada penggunaan teknologi, tetapi juga pada reintegrasi proses, penyederhanaan administrasi, dan digitalisasi yang benar-benar memperbaiki relasi antara organisasi publik dan pengguna layanan. Oleh karena itu, pada Puskesmas Banggae I, teknologi informasi perlu dilihat sebagai bagian dari transformasi proses pelaporan, bukan sekadar penggunaan aplikasi.

Kompetensi SDM juga berpengaruh signifikan dengan arah koefisien negatif. Temuan ini dapat menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi formal dengan tuntutan teknis pelaporan BLUD. Pegawai mungkin memiliki tingkat pendidikan atau pengalaman tertentu, tetapi belum tentu memiliki kompetensi khusus dalam akuntansi BLUD, pengelolaan kas, penyusunan laporan kinerja, dan penggunaan sistem informasi keuangan. Dalam teori *knowledge-based view*, Grant (1996) menegaskan bahwa pengetahuan individu harus diintegrasikan ke dalam proses organisasi agar menghasilkan kapabilitas. Dengan demikian, kompetensi SDM tidak cukup hanya dilihat dari atribut personal, tetapi harus diwujudkan dalam mekanisme kerja, pembagian tugas, pelatihan, dan sistem pendukung yang memungkinkan pengetahuan digunakan secara efektif.

Arah negatif pada kompetensi SDM juga dapat terjadi karena pegawai dengan pemahaman lebih tinggi cenderung lebih kritis terhadap kualitas pelaporan dan lebih menyadari kelemahan sistem. Dalam penelitian sektor publik, penggunaan informasi kinerja tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh budaya organisasi, ketersediaan informasi, kepemimpinan, dan fleksibilitas administratif (Moynihan and Pandey, 2010). Dengan demikian, peningkatan kompetensi perlu diarahkan pada kompetensi spesifik BLUD, bukan hanya kompetensi umum pegawai.

Berbeda dengan dua variabel sebelumnya, pengawasan fungsional berpengaruh positif signifikan terhadap pelaporan kinerja BLUD. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik pengawasan fungsional, semakin baik pula pelaporan kinerja BLUD. Temuan ini sangat relevan dengan karakter organisasi publik yang mengandalkan mekanisme kepatuhan, audit, dan akuntabilitas. Cordery and Hay (2019) menjelaskan bahwa pengawasan dan audit sektor publik memiliki peran penting dalam memastikan akuntabilitas, menilai kepatuhan, dan mendorong efektivitas penggunaan sumber daya publik. Dalam konteks Puskesmas Banggae I, pengawasan fungsional dapat membantu memastikan bahwa proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban berjalan sesuai aturan.

### Koefisien Determinasi

Hasil koefisien determinasi menunjukkan nilai R sebesar 0,725, R Square sebesar 0,526, Adjusted R Square sebesar 0,496, dan Standard Error of the Estimate sebesar 6,493. Nilai R Square sebesar 0,526 menunjukkan bahwa 52,6% variasi pelaporan kinerja BLUD dapat dijelaskan oleh pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi SDM, dan pengawasan fungsional. Sisanya sebesar 47,4% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

Tabel 6. Koefisien Determinasi

Statistik	Nilai
Koefisien Korelasi (R)	0,725
Koefisien Determinasi (R Square)	0,526
R Square yang Disesuaikan	0,496
Standard Error of the Estimate	6,493

Sumber: Data Primer, 2025.

Nilai R Square sebesar 0,526 menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan penjelasan yang cukup kuat, karena lebih dari separuh variasi pelaporan kinerja

BLUD dapat dijelaskan oleh tiga variabel utama yang diuji. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa pelaporan kinerja BLUD merupakan hasil interaksi antara teknologi, kompetensi manusia, dan mekanisme pengawasan. Namun, masih terdapat 47,4% variasi pelaporan kinerja yang dijelaskan oleh faktor lain di luar model, seperti kualitas kepemimpinan, budaya organisasi, dukungan regulasi, ketersediaan anggaran, kompleksitas aplikasi, koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Badan Keuangan Daerah, serta kualitas sistem pengendalian internal.

Dalam literatur manajemen kinerja sektor publik, hasil ini sejalan dengan pandangan bahwa informasi kinerja hanya akan bernilai apabila digunakan dalam sistem organisasi yang mendukung pengambilan keputusan. Hammerschmid, Van de Walle and Štimac (2013) menunjukkan bahwa penggunaan informasi kinerja dalam organisasi publik sangat dipengaruhi oleh instrumen manajemen kinerja dan faktor organisasi. Oleh karena itu, meskipun teknologi informasi, kompetensi SDM, dan pengawasan fungsional merupakan faktor penting, penguatan pelaporan BLUD juga perlu dikaitkan dengan tata kelola organisasi secara lebih luas.

Secara teoritis, temuan ini memperkuat konsep akuntabilitas publik dan *New Public Management*. BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, tetapi fleksibilitas tersebut harus diimbangi oleh kemampuan menghasilkan laporan kinerja yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kerangka NPM, pelaporan kinerja menjadi instrumen untuk memastikan organisasi publik tidak hanya menyerap anggaran, tetapi juga menunjukkan hasil dan pertanggungjawaban. Dalam kerangka akuntabilitas publik, pelaporan menjadi medium bagi organisasi untuk menjelaskan tindakan dan capaian kepada pihak yang berwenang menilai kinerjanya. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa peningkatan pelaporan kinerja BLUD di Puskesmas Banggae I harus diarahkan pada tiga strategi utama: optimalisasi sistem informasi yang mudah digunakan dan terintegrasi, peningkatan kompetensi teknis pegawai sesuai kebutuhan pelaporan BLUD, serta penguatan pengawasan fungsional secara berkelanjutan.

## **SIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaporan kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Puskesmas Banggae I Kabupaten Majene dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan fungsional. Ketiga faktor tersebut merupakan komponen penting dalam mendukung akuntabilitas pelaporan pada fasilitas pelayanan kesehatan primer. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan :

1. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap pelaporan kinerja BLUD Puskesmas Banggae I Kabupaten Majene. Hal ini mengindikasikan perlunya integrasi sistem, kemudahan penggunaan aplikasi, dukungan teknis, serta pelatihan pegawai agar teknologi benar-benar berfungsi sebagai instrumen peningkatan kualitas pelaporan.
2. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap pelaporan kinerja BLUD Puskesmas Banggae I Kabupaten Majene. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi perlu diarahkan pada kemampuan yang lebih spesifik, terutama pengelolaan keuangan BLUD, penyusunan laporan kinerja, pemahaman regulasi, dan penggunaan sistem pelaporan.
3. Pengawasan fungsional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan kinerja BLUD Puskesmas Banggae I Kabupaten Majene. Temuan ini menegaskan bahwa pengawasan berperan penting dalam memastikan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi.

4. Pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan fungsional secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pelaporan kinerja BLUD di Puskesmas Banggae I Kabupaten Majene. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa 52,6% variasi pelaporan kinerja BLUD dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sedangkan 47,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.
5. Secara parsial, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan dengan koefisien regresi -1,610 dan signifikansi 0,001, sedangkan kompetensi SDM berpengaruh signifikan dengan koefisien regresi -1,047 dan signifikansi 0,013. Arah koefisien negatif menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi SDM belum sepenuhnya optimal dalam mendukung pelaporan kinerja BLUD Puskesmas Banggae I Kabupaten Majene, sehingga masih diperlukan integrasi sistem, pelatihan teknis, dan penguatan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan BLUD.

## **Referensi :**

- Aini, Z., & Yasni, H. (2022). Faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini*, 3(2), 176–190. <https://doi.org/10.31258/current.3.2.176-190>
- Behn, R. D. (2003). Why measure performance? Different purposes require different measures. *Public Administration Review*, 63(5), 586–606. <https://doi.org/10.1111/1540-6210.00322>
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Brynjolfsson, E., & Hitt, L. M. (2000). Beyond computation: Information technology, organizational transformation and business performance. *Journal of Economic Perspectives*, 14(4), 23–48. <https://doi.org/10.1257/jep.14.4.23>
- Cohen, J., Cohen, P., West, S. G., & Aiken, L. S. (2003). *Applied multiple regression/correlation analysis for the behavioral sciences* (3rd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.
- Cordery, C. J., & Hay, D. (2019). Supreme Audit Institutions and public value: Demonstrating relevance. *Financial Accountability & Management*, 35(2), 128–142. <https://doi.org/10.1111/faam.12185>
- Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika*, 16(3), 297–334. <https://doi.org/10.1007/BF02310555>
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. *Journal of Management Information Systems*, 19(4), 9–30. <https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748>
- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). New Public Management is dead – Long live digital-era governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 16(3), 467–494. <https://doi.org/10.1093/jopart/mui057>
- Grant, R. M. (1996). Toward a knowledge-based theory of the firm. *Strategic Management Journal*, 17(S2), 109–122. <https://doi.org/10.1002/smj.4250171110>
- Hammerschmid, G., Van de Walle, S., & Štimac, V. (2013). Internal and external use of performance information in public organizations: Results from an international survey. *Public Money & Management*, 33(4), 261–268. <https://doi.org/10.1080/09540962.2013.799803>
- Hood, C. (1991). A public management for all seasons? *Public Administration*, 69(1), 3–19. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x>

- Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. *Archives of Psychology*, 140, 1–55.
- Moynihan, D. P., & Pandey, S. K. (2010). The big question for performance management: Why do managers use performance information? *Journal of Public Administration Research and Theory*, 20(4), 849–866. <https://doi.org/10.1093/jopart/muq004>
- Piatti-Fünfkirchen, M., & Schneider, P. (2018). From stumbling block to enabler: The role of public financial management in health service delivery in Tanzania and Zambia. *Health Systems & Reform*, 4(4), 336–345. <https://doi.org/10.1080/23288604.2018.1513266>
- Ployhart, R. E., & Moliterno, T. P. (2011). Emergence of the human capital resource: A multilevel model. *Academy of Management Review*, 36(1), 127–150. <https://doi.org/10.5465/amr.2009.0318>
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2017). *Public management reform: A comparative analysis – Into the age of austerity* (4th ed.). Oxford University Press.
- Rakhman, F., & Wijayana, S. (2019). Determinants of financial reporting quality in the public sector: Evidence from Indonesia. *The International Journal of Accounting*, 54(3), 1–35. <https://doi.org/10.1142/S1094406019500094>
- Ricardo, R., Trisna, W. V., & Astika, F. (2023). Analisis faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan (BLUD) Puskesmas pada Pemerintah Kota Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 13(1), 117–125. <https://doi.org/10.37859/jae.v13i1.4388>
- Rodríguez Bolívar, M. P., Caba Pérez, C., & López Hernández, A. M. (2007). E-government and public financial reporting: The case of Spanish regional governments. *The American Review of Public Administration*, 37(2), 142–177. <https://doi.org/10.1177/0275074006293193>
- Sandria, M., Agusti, R., & Putra, A. A. (2020). Determinan efektivitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD): Dimoderasi sistem pengendalian intern pemerintah. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini*, 1(2), 264–284. <https://doi.org/10.31258/jc.1.2.266-286>
- Tavakol, M., & Dennick, R. (2011). Making sense of Cronbach's alpha. *International Journal of Medical Education*, 2, 53–55. <https://doi.org/10.5116/ijme.4dfb.8dfd>
- Vandenbroucke, J. P., von Elm, E., Altman, D. G., Gøtzsche, P. C., Mulrow, C. D., Pocock, S. J., Poole, C., Schlesselman, J. J., & Egger, M. (2007). Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE): Explanation and elaboration. *PLoS Medicine*, 4(10), e297. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0040297>
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly*, 27(3), 425–478. <https://doi.org/10.2307/30036540>
- von Elm, E., Altman, D. G., Egger, M., Pocock, S. J., Gøtzsche, P. C., & Vandenbroucke, J. P. (2007). The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) statement: Guidelines for reporting observational studies. *PLoS Medicine*, 4(10), e296. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0040296>